

## PENTINGNYA DANA DESA DORONG KONTRIBUSI PETANI PADA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Febby Abdillah Risky<sup>1</sup>, Husni Mubaroq<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Panca Marga

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

### Abstrak

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Banyaknya pekerja di pertanian membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah melalui Anggaran Dana Desa. Potensi ini, misalnya, saat ini meningkatkan harga komoditas pertanian seperti beras, jagung kedelai, dan sektor pertanian yang tidak mudah terpengaruh oleh krisis ekonomi dunia (Basalim, Alim, & Oesman, 2000). Oleh karena itu, pengembangan pertanian perlu ditingkatkan untuk mendapatkan produksi yang lebih efisien. Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberkledung, lebih difokuskan pada pemeliharaan pertanian, mulai dari alat pertanian, sosialisasi pertanian, dan pengawasan. Beberapa peralatan pertanian telah disediakan untuk mendukung pertanian di Desa Sumberkledung seperti traktor, mesin panen padi, mesin pemotong rumput dll. Jadi masyarakat tidak perlu lagi menyewa peralatan pertanian karena telah disediakan oleh desa, dan ini sangat membantu masyarakat karena dengan bantuan mengurangi pengeluaran pertanian. Sosialisasi dilakukan oleh kelompok pemuda dan kelompok tani di Desa Sumberkledung mengenai pemberantasan hama, pengobatan yang baik untuk setiap jenis tanaman dan cara merawat tanaman. Untuk sosialisasi ini, diadakan sebulan sekali dengan adanya sosialisasi ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam menjawab semua masalah yang dihadapi di pabrik mereka. Setelah sosialisasi, akan ada pengawasan pada setiap petani oleh tim sosialisasi untuk melihat perkembangan pertanian, apakah ada kemajuan atau bahkan menurun. Di situlah sebenarnya fungsi sosialisasi dan pengawasan. Dengan kolaborasi antara kelompok pemuda, kelompok tani dan pemerintah desa akan membuat dampak yang baik pada kemajuan pertanian di Desa Sumberkledung.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa, komoditas pertanian

### Abstract

The agricultural sector in Indonesia has a very important role in economic development. The large number of workers in agriculture needs special attention from the government through the Village Fund Budget. This potential, for example, is currently increasing in the price of agricultural commodities such as rice, soybean corn in the world, and the agricultural sector which is not easily affected by the world economic crisis. Therefore, agricultural development needs to be increased to get more efficient production. For the implementation of the Village Fund Allocation in Sumberkledung Village, it is more focused on maintaining agriculture, starting from agricultural tools, agricultural socialization, and supervision. Some agricultural equipment has been provided to support agriculture in Sumberkledung Village such as tractors, rice harvesting machines, lawn mowers etc. So the community no longer needs to rent agricultural equipment because it has been provided by the village, and this is very helpful to the community because with the help to reduce agricultural expenditure. Socialization was carried out by youth groups and farmer groups in Sumberkledung Village regarding the eradication of pests, good medicine for each type of plant and how to care for plants. For this socialization, it is held once a month with the existence of this socialization is very helpful and facilitates the community in answering all the problems faced in their plants. After the socialization, there will be supervision on each farmer by the socialization team to see the development of the agriculture, is there any progress or even decreases. That's where the actual function of the socialization and supervision. With the collaboration between youth groups, farmer groups and the village government will make a good impact on the progress of agriculture in Sumberkledung Village.

**Keywords:** Village Fund Allocation, agricultural commodities

### PENDAHULUAN

Alamat Korespondensi Penulis:

Nama : Febby Abdillah, Husni Mubaroq

Email : husnimubaroq139@gmail.com,

febbyabdillah97@gmail.com

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 107 Pabean, Dringu,

Probolinggo 67271

Sektor pertanian di Indonesia sangat mempunyai peran penting dalam sebuah pembangunan perekonomian (1). Banyaknya tenaga kerja di bidang pertanian perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Potensi itu misalnya pada saat ini harga komoditas pertanian seperti beras, jagung kedelai di dunia yang

semakin meningkat, serta sektor pertanian yang tidak mudah terkena dampak krisis ekonomi dunia (2). Oleh sebab itu, pembangunan pertanian perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih efisien.

Namun saat ini, di Indonesia sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan banyaknya masalah yang di hadapi oleh para petani yang dikarenakan gagal panen, minimnya infrastruktur dan menyusutnya lahan pertanian Permasalahan tersebut akan berdampak pada fluktuasi produktivitas sektor pertanian yang selanjutnya berpengaruh pada negara dan petani. Bagi negara, produktivitas yang meningkat dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian melalui kegiatan ekspor maupun pengolahan hasil pertanian. Sedangkan bagi petani, peningkatan produktivitas dapat berdampak pula pada kesejahteraan para petani. Semakin tinggi produktivitas pertanian, maka semakin tinggi pula hasil pertanian yang dijual di pasar sehingga pendapatan petani semakin meningkat pula (3).

Kondisi di atas tidak sebanding dengan transformasi struktural yang sedang terjadi pada sektor pertanian, utamanya pada petani. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 35,9 juta orang atau sekitar 30% dari jumlah total pekerja pada tahun 2017 dan menjadi 35,7 juta atau sekitar 29% dari total pekerja di Indonesia pada tahun 2018. Namun, penurunan ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi negara yang ekonominya sedang bertumbuh karena pekerja sektor pertanian di Malaysia jauh lebih kecil yaitu hanya 11%. Bahkan di bawah 2% untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris (4).

Kontribusi pekerja sektor pertanian seharusnya berkurang seiring dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Jika tidak, tenaga kerja sektor pertanian akan mengalami kenaikan dan menimbulkan masalah seperti produktivitas yang rendah, upah yang rendah dan kemiskinan di berbagai daerah. Lambatnya penurunan jumlah petani membuat Indonesia tidak secara optimal mendapat keuntungan dari transisi di sektor pertanian ke sektor industri atau jasa. Fenomena transisi ini lazim terjadi pada negara-negara yang per ekonominya sedang berkembang. Saat ini kontribusi sektor pertanian di Indonesia menurun sebesar 74% tahun 1967 hingga 2014. Penurunan jumlah petani ditambah

dengan meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dijadikan indikator pertumbuhan positif pembangunan (5). Namun kondisi ini sepertinya sulit diterima begitu saja oleh sejumlah pakar ekonomi dan sosiologi sosial.

Salah satu alasan perpindahan petani ke sektor non-pertanian di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan. Perpindahan tenaga kerja ini dapat dipercepat dengan penegakan wajib belajar 12 tahun di daerah perdesaan. Selain itu, lambatnya adopsi teknologi pada sektor pertanian (mekanisasi) di Indonesia membuat tenaga manusia masih sangat diperlukan. Karenanya mekanisasi perlu dipacu untuk menurunkan angka ketergantungan terhadap tenaga manusia.

Meski demikian, transformasi pekerja sektor pertanian ke sektor non-pertanian tidak selalu terjadi secara langsung. Untuk dapat bekerja di sektor non-pertanian dengan upah yang lebih tinggi, sebagian pekerja pertanian perdesaan berpindah terlebih ke sektor non-pertanian perdesaan. Membangun sektor non-pertanian yaitu pengembangan sektor industri dan jasa di perdesaan. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: 1. menurunnya pangsa sektor pertanian, 2. meningkatnya pangsa sektor industri, dan 3. pangsa sektor jasa juga memberikan kontribusi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (6).

Menurut teori Lewis, kelebihan tenaga kerja pada sektor pertanian perdesaan akan terus diserap di sektor non-pertanian sampai pada titik di mana tidak ada lagi kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Kondisi ini sudah terjadi di negara-negara maju: pekerja pertaniannya sedikit namun sangat produktif(6). Jadi, transformasi struktural perlu terus didorong karena memicu peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika tenaga kerja pertanian berkurang selama perpindahan tersebut meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berawal dari perkembangan inilah, penulis merasa topik ini menarik untuk diteliti. Selain nantinya akan memunculkan jawaban sebab akibat, nilai, dan transformasi struktural, topik ini juga diharapkan dapat memberikan pemaparan, keadaan sosial masyarakat dalam menyikapi suatu paradigma. Topik ini juga menarik untuk diteliti secara teoritis, topik ini akan menggambarkan pentingnya dana desa mendorong berkontribusi petani dalam pembangunan sumber daya manusia. Dari sudut

pandang ini, menunjukkan bahwa dengan semakin menurun sektor pertanian, membawa dampak buruk bagi petani sehingga diperlukan alih profesi menjadi alternatif utama bagi masyarakat. Peran desa sendiri sangatlah penting, untuk benar-benar pandai dalam menggunakan dana desa yang betul-betul padat karya sehingga bisa menyerap tenaga kerja di desa, mengingat penyaluran dana desa yang belum cukup efektif menampung seluruh angkatan kerja di desa (7).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Dana Desa

#### a. Pengertian Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1). Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

“Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.”

#### b. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan (Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176).

## 2. Petani

### a. Definisi Petani

“Menurut (Faisal Kasryno, 2000) Petani adalah pelaksana utama pembangunan pertanian, dengan demikian keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia petani.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional sektor pertanian juga berperan dalam menyediakan tenaga kerja untuk sektor ekonomi lainnya, berperan pula sebagai penyedia modal, bahan baku dan pasar bagi produk di luar sektor pertanian.”

### b. Kelembagaan Petani Dalam Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan (Uphoff, 1986; Johnson (1985) dalam Pakpahan, 1989). Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) untuk mencapai *performance* pembangunan yang dikehendaki.

### 3. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini, peranan sumberdaya manusia dalam konteks kegiatan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan ekonomi daerah (wilayah) semakin signifikan. Faktor sumberdaya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam telaah teori-teori pembangunan ekonomi, yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional maupun daerah.

### Metode Pengumpulan Data

relevan dengan masalah yang diteliti. Di lakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa Sumberkledung dan petani desa Sumberkledung. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang berperan penting dalam pembangunan desa, terutama pentingnya dana desa dorong berkontribusi petani dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dalam observasi ini, peneliti mengamati keadaan keseharian di lokasi yang akan diteliti, mengenai pentingnya dana desa dorong petani untuk pembangunan sumberdaya manusia di bidang pertanian yaitu dana desa subjek dan petani sebagai objek dalam penelitian ini. Dalam hal ini untuk melengkapi penelitian ini perlu ditunjang dengan data dokumenter. Ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan sudah terhimpun dan dikelola oleh pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya pada Desa Sumberkledung dalam rangka pentingnya dana desa dorong petani untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah saat peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan desa terutama di bidang pertanian yang bersumber dari ADD, seperti dalam kegiatan study banding yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian dan kemajuan pola pikir terhadap pertanian di desa Sumberkledung.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan keuangan desa menurut Per mendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Per mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal yang menjadi perhatian penting dalam Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang proses tersebut (8).

##### **Perencanaan**

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian

guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. dalam perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD melibatkan masyarakat, setelah kesepakatan disetujui akan di lanjutkan dengan pengumuman menggunakan banner agar seluruh masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan ke depannya. Segala kegiatan pelaksanaan nantinya juga akan melibatkan masyarakat, terutama dalam kegiatan di bidang pertanian yang mendapat perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Desa Sumberkledung bermata pencarian sebagai petani. Dimana dalam kegiatan ini pemerintah desa mengajak masyarakat untuk study banding di lokasi pertanian yang lebih maju dan disana akan mendapat beberapa ilmu tentang bagaimana merawat, menjaga dan obat apa yang terbaik untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas. Dari kegiatan tersebut di harap dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, karena dengan petani yang berkualitas akan terciptanya ekonomi yang stabil.

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Sumberkledung tidak ada kendala dan semua berjalan dengan lancar juga untuk partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang di laksanakan sangat besar. Masyarakat sangat senang karena di setiap pelaksanaan kegiatan desa selalu melibatkan masyarakat. Terutama di bidang pertanian masyarakat di ajak untuk study banding untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanian yang lebih baik, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas akan membentuk sebuah desa yang berkualitas juga.

##### **Penatausahaan (Tata Kelola)**

Proses tata usaha dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Tata kelola keuangan di desa Sumberkledung menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (sis keudes). Penatausahaan di desa sumberkledung kadang tidak sesuai dengan perencanaan awal jadi untuk

penatausahaan sendiri harus benar-benar teliti sebelum semua kegiatan dan anggaran belum terelasi maka dilakukan perencanaan yang matang.

**Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa. Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Sumberkledung setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya. Untuk di desa sendiri laporan tentang anggaran sudah terbuka dan sudah melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan setiap program.

**Pertanggungjawaban**

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa Sumberkledung mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten atau kota dan masyarakat.

**APBDes TAHUN ANGGARAN 2019  
 DESA SUMBERKLEDUNG  
 KEC. TEGALSIWALAN KAB. PROBOLINGGO**

PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1,257,830,500
1. ALOKASI DANA DESA	Rp. 253,963,800
2. DANA DESA	Rp. 981,566,000
3. BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI	Rp. 22,300,700
4. BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	Rp. -
SILPA TAHUN 2018	Rp. 22,110,213
PENYERTAAN MODAL BUMDes	Rp. 22,110,213
BELANJA	
1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA	Rp. 269,864,500
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 942,808,900
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 10,750,000
4. BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 19,620,000
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA / TAK TERDUGA	Rp. 14,787,100

## KESIMPULAN

Sebagai pembahasan akhir dari skripsi ini, peneliti ingin sedikit memberikan kesimpulan, mengenai pentingnya dana desa dorong berkontribusi petani pada pembangunan sumberdaya manusia, antara lain:

Pemerintah desa berperan penting mengalokasikan dana desa melalui sejumlah program untuk pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pertanian. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan sumber daya manusia Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo secara normatif dan administratif sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan di bidang pertanian sangat besar, meskipun masih dalam proses dan banyak masyarakat yang masih belum faham tentang bagaimana cara pengelolaan dan perawatan serta pupuk apa yang baik untuk tanaman pertanian.

Di samping ketidaktahuan masyarakat pemerintah desa memberikan pendampingan terhadap masyarakat melalui kelompok tani yang ada di desa Sumberkledung dengan teknik yang sudah di dapat dalam study banding. Dengan begitu semangat masyarakat akan besar karena merasa sangat di perhatikan oleh pemerintah desa. Dengan petani yang berkualitas akan menciptakan perekonomian yang lebih baik, perekonomian yang baik akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Sumberkledung.  
(Calibri 10 Justify)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menuliskan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu secara substansi maupun finansial.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Muta'ali L. Dinamika Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. UGM PRESS; 2019. 274 hlm.
2. M.M PDIHZZ. Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal. SAH MEDIA; 2017. 243 hlm.
3. Tambunan T. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia: beberapa isu penting. Ghalia Indonesia; 2003. 288 hlm.
4. Kurniawati E. Menteri Pertanian Senang Petani Alih Profesi [Internet]. Tempo. 2014

[dikutip 9 Mei 2019]. Tersedia pada:  
<https://bisnis.tempo.co/read/560059/men-teri-pertanian-senang-petani-alih-profesi>

5. Perentjanaan IDPB. Kumpulan data statistik pertanian. publisher not identified; 1971. Dimensions 34.0x21.0 cm, book.
6. Todaro MP, Smith SC. Economic Development. Erlangga; 2006. 652 hlm.
7. M.Si AS SP, M.Hut MZ S Hut. INTI SARI SOSIOLOGI PERTANIAN. Penerbit CV. INTI MEDIATAMA; 2017. 130 hlm.
8. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir) | Sasti Ferina | JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA [Internet]. [dikutip 21 Desember 2019]. Tersedia pada:  
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmb/s/article/view/3991>